

IMPLEMENTATION OF SMART INDONESIA CARD (KIP) POLICY IN POVERTY ALLEVIATION IN MAROS REGENCY

Andi Aslinda¹, Umi Kalsum², Andi Cudai Nur^{3*}

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Administrasi,
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar

*e-mail Correspondence : andicudainur@unm.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of local government policies in poverty reduction in Maros Regency through the Smart Indonesia Card (KIP). This research uses a qualitative approach and produces descriptive data. Data collection is done by observation, interviews and documentation. Data is processed using interactive model analysis, namely data condensation, data presentation and conclusion testing. The focus of this research is based on the policy implementation model proposed by George C Edward III. 4 (four) variables that affect policy implementation, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. Based on the results of the research obtained, it can be concluded that the Maros Regency Social Office has implemented and implemented the Smart Indonesia Card (KIP) policy as an effort to overcome poverty in Maros Regency. To measure the implementation using four indicators, namely 1). Communication, Communication is considered very important in policy implementation, in the context of communication there are three things that are considered, namely a) Information, regarding the implementation of the KIP policy has been made by the government as the President's flagship program in overcoming poverty in Maros Regency through the transmission of delegations given through the Regent of Maros to the Social Service, b) Clarity, communication received by KIP implementers must be clear and not confusing. c) Consistently, Maros district social service employees must be consistent in implementing the KIP smart Indonesia card policy. 2) Resources, sources that support effective policies, namely a) staff, employees who handle KIP participants are still lacking, b) information, employees in the Maros Regency Social Service must know what to do in the future through information submitted by superiors, c) the authority runs through the Maros Regency Social Service Government in terms of implementing the KIP smart Indonesia Card policy. d) facilities, advice and infrastructure in the Maros Regency Social Office, especially in the Smart Indonesia Card policy program, the KIP still lacks supporting facilities in carrying out duties, 3) Disposition, has been carried out well by the government and stakeholders as evidenced by various kinds of support and supervision. 4) bureaucratic structure, factors that have an influence on the policy implementation process, namely a) bureaucratic structure, The existing structure in the Maros Regency Social Office has been made based on the main duties and functions of each, b) Standard Operating SOP procedures, the Maros Regency Social Office already has clear SOPs and clear organizational structures as well.

Keywords: Policy Implementation, Poverty, and KIP

PENDAHULUAN

Hakekat pembangunan adalah upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, hal tersebut di perjelas dalam pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan kemerdekaan yang memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian diasumsikan bahwa pembangunan nasional dapat menimbulkan keseimbangan, keserasian dan keserasian dalam kehidupan masyarakat.

Kemiskinan merupakan permasalahan umum yang terjadi dinegara berkembang tidak terkecuali di Indonesia. Kemiskinan adalah suatu keadaan yang menggambarkan kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok dapat diartikan sebagai suatu paket barang dan jasa yang diperlukan oleh setiap orang untuk hidup secara manusiawi yang terdiri dari sandang, pangan, dan papan. (Lisnawati, 2020).

Dalam definisi yang lebih luas, kemiskinan bersifat multimedimensional, artinya kemiskinan adalah ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan manusia yang beraneka ragam yang selanjutnya dapat dipandang melalui berbagai aspek. Ditinjau dari aspek primer kemiskinan meliputi miskin terhadap asset, rendahnya partisipasi organisasi sosial politik, serta terbatasnya pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan aspek sekunder mencakup miskin terhadap jaringan social, rendahnya sumber-sumber keuangan dan terbatasnya informasi. (Almusyhaful 2018).

Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas pemerintah Indonesia dalam mengurangi angka kemiskinan. Pemerintah saat ini memiliki program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat serta program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha kecil, yang dijalankan berbagai elemen pemerintah baik pusat maupun daerah.

Di Kabupaten Maros telah disahkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Kemiskinan, khusus dalam Pasal 13 menyatakan bahwa Strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Maros yaitu dengan mengurangi beban pengeluaran bagi penduduk miskin, (b) meningkatkan kemampuan dan pendapatan penduduk miskin, (c) mengembankan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan usaha kecil untuk masyarakat miskin, (d) memenuhi kebutuhan dasar penduduk miskin dan (e) mensinergikan kebijakan program penanggangan kemiskinan

Adanya kebijakan penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk melakukan pembangunan masyarakat yang diartikan sebagai usaha yang sistematis, terarah dan diselenggarakan langsung untuk masyarakat. Pemerintah daerah menerapkan dua manajemen pendekatan dalam menyelenggarakan pembangunan masyarakat yakni, pertama adalah manajemen Top-down yang arah tujuannya ditetapkan oleh kepemimpinan atau pemerintah untuk disampaikan kepada masyarakat atau organisasi yang terlibat sedangkan yang kedua adalah manajemen Bottom-up yaitu arah tujuannya ditetapkan oleh masyarakat kemudian disalurkan sebagai aspirasi kepada pemerintah.

Pada dasarnya setiap program dari pemerintah harus mencerminkan kombinasi antara kedua pendekatan tersebut karena pembangunan masyarakat akan tetap berpusat pada setiap manusia (*people contered development*). Berdasarkan hal tersebut, sesuai realita yang saya temukan dalam lokasi penelitian menjuruskan bahwa pendekatan yang diterapkan oleh pemerintah lebih menggunakan manajemen Bottom-up untuk proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pendekatan dengan manajemen Bottom-up sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mewujudkan tercapainya pembangunan masyarakat karena unsur pelaksanaannya yang lebih terbuka, inovatif dan kreatif. Berikut beberapa ide atau aspirasi masyarakat yang telah menjadi program yang telah diselenggarakan oleh pemerintah di Kabupaten Maros sebagai bentuk pembangunan masyarakat untuk meminimalisir dampak dari kemiskinan:

Tabel 1. Program Pemerintah Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Maros

| No | Nama program | Capaian |
|----|---|---|
| 1 | PKH (Program Keluarga Harapan) | Penyerahan kepada 5.800 Keluarga |
| 2 | BLT (Bantuan Langsung Tunai) | Penyerahan Kepada 25.586 Jiwa(500.000 / jiwa) |
| 3 | KIS (Kartu Indonesia Sehat) | Penyerahan Kepada 160.000 Jiwa |
| 4 | KIP (Kartu Indonesia Pintar) | Penyerahan Kepada 320 Jiwa |
| 5 | KUBE-FM (Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin) | - |
| 6 | UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) | Penyerahan Kepada 2.971 PelakuUsaha |

Peraturan Presiden Nomor 166 tahun 2014 mengatur Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa program penanggulangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi

Strategi pembangunan yang dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas masyarakat melalui pembedayaan masyarakat yaitu proses belajar yang merupakan usaha terencana dan sistematis yang dilaksanakan daya dan kemampuan yang terdapat dalam diri individu dan kelompok masyarakat sehingga mampu melakukan transformasi sosial.

Sumber daya manusia merupakan modal yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan. Manusia memiliki peran sebagai pelaku sekaligus sasaran pembangunan. Pemberdayaan dan pembangunan memiliki keterkaitan yang erat. Pemberdayaan masyarakat merupakan bentuk kemandirian dalam mengatasi permasalahan mereka melalui kreativitas untuk meningkatkan kualitas hidup. Upaya peningkatan kualitas hidup yang diperlukan agar masyarakat memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk keluar dari permasalahan mereka. Arah pemberdayaan masyarakat yang paling efektif dan lebih cepat untuk mengatasi masalah kemiskinan dan sebagai pembangunan bangsa.

Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan ekonomi seseorang untuk memenuhi taraf hidup rata-rata masyarakat disuatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan yang memenuhi kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, papan. Kapasitas pendapatan yang rendah juga akan berdampak pada berkurangnya kemampuan memenuhi standar hidup rata-ratan seperti standar kesehatan masyarakat yang disebut miskin dapat dilihat dari besarnya pendapatan dalam memenuhi taraf hidupnya.

Pada prinsipnya taraf hidup suatu masyarakat tidak hanya terpenuhinya kebutuhan akan pangan, tetapi juga terpenuhinya kebutuhan akan kesehatan dan pendidikan, tempat tinggal atau pemukiman. Gejala-gejala diatas menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan salah satu taraf hidup atau standar kesejahteraan masyarakat disuatu daerah. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin jika memiliki pendapatan yang jauh lebih rendah dari pendapatan rata-rata sehingga tidak memiliki banyak kesempatan untuk mensejahterakan dirinya sendiri.

Kebijakan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kemiskinan, dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa kemiskinan adalah keadaan sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan social dan politik.

Masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi masyarakat Indonesia dari dulu hingga sekarang, dan sejauh ini pemerintah belum mempunyai solusi yang memadai walaupun berbagai rencana, kebijakan, dan program pembangunan telah dan sedang dilaksanakan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Begitupun dengan kondisi di beberapa daerah yang ada di Indonesia, Kabupaten Maros merupakan salah satu contoh daerah yang masih mengalami permasalahan kemiskinan.

Permasalahan penduduk miskin diantaranya ialah jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi, kemampuan sumber daya dan keterampilan penduduk miskin sangat terbatas, kesehatan dan gizi keluarga miskin masih rendah, kemampuan keluarga miskin menyekolahkan anak sangat terbatas, serta belum ditunjang dengan kebijakan daerah yang optimal.

Berikut penulis paparkan mengenai presentase kemiskinan, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kabupaten Maros:

Tabel.2 Presentase Kemiskinan di Kabupaten Maros

| No | Jumlah Kemiskinan | Presentase Kemiskinan (%) | Tahun (2019-2021) |
|----|-------------------|---------------------------|-------------------|
| 1. | 34, 85 ribu jiwa | 9,86 % | 2019 |
| 2. | 34, 62 ribu jiwa | 9,74 % | 2020 |
| 3. | 34,11 ribu jiwa | 9,67 % | 2021 |

Tabel 3. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahankemiskinan di Kabupaten Maro

| Tahun | Indeks Kedalaman Kemiskinan | Indeks Keparahankemiskinan |
|-------|-----------------------------|----------------------------|
|-------|-----------------------------|----------------------------|

| | | |
|------|------|------|
| 2019 | 2,58 | 0,86 |
| 2020 | 2,19 | 0,71 |
| 2021 | 2,50 | 0,89 |

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan multidimensi, maka dari itu kegiatan yang ditujukan untuk pengentasan kemiskinan harus dilaksanakan secara komprehensif dan terpadu karena penyebab kemiskinan salah satunya adalah karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi yang tidak sama, sehingga ada masyarakat yang tidak dapat berpartisipasi maksimal dalam proses pembangunan yang menyebabkan pendapatan per individu atau kelompok berbeda-beda.

Tingkat kemiskinan yang masih tinggi ini memberikan indikasi bahwa ada sesuatu yang perlu dicermati dan dikaji ulang atas strategi, dan program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Kebijakan Publik

Konsep kebijakan juga harus dibedakan dengan keputusan, menurut James E Anderson (dalam Nur, 2018) yang mengungkapkan bahwa Kebijakan adalah *‘a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern’* (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Suatu kebijakan dapat disebut sebagai kebijakan jika memiliki empat unsur yaitu (Ali & Alam, 2016) : Adanya pernyataan kehendak, Penyertaan didasarkan berdasarkan otoritas, Adanya kewenangan untuk melakukan pengaturan dan jika perlu melakukan pemaksaan kehendak, Adanya tujuan yang dikehendaki.

Proses kebijakan publik dapat lebih mudah di pahami jika dikaji tahap demi tahap, inilah yang menjadikan kebijakan publik penuh warna dan kajiannya sangat dinamis. Proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis (Suharno, 2016). Disamping itu, Thomas R. Dye dalam merumuskan kebijakan publik sebagai “pilihan pemerintah untuk bertindak atau tidak bertindak” (Santosa, 2017)

2. Konsep Implementasi Kebijakan

Secara umum istilah implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.

(Usman, 2012), Implementasi bermula pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

3. Teori Implementasi Kebijakan

George C. Edwards III (1980) Dalam (Mulyadi 2018) mengemukakan empat variable yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni: 1) Komunikasi, 2) Sumberdaya, 3) disposisi dan 4) struktur birokrasi.

Keberhasilan implementasi menurut Merilee s. Grindle (mulyadi 2018) dipengaruhi oleh isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan kebijakan (content of implementation). Ide dasarnya bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan.

4. Sistem Pemerintahan Indonesia

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Sistem adalah perangkat unsur yang paling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Meksasai mengemukakan pendapat dari Ellydar Chaidir, Sistem berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata syn dan kata Histani yang berarti menempatkan bersama to place together. Lebih lanjut dinyatakan, Secara umum merupakan suatu struktur yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berhubungan dan apabila salah satu sebagian komponen tersebut tidak atau kurang berfungsi, maka akan mempengaruhi komponen-komponen yang lainnya.

Pemerintah daerah identik dengan istilah otonomi. Pengertian otonomi pada bidang politik diartikan sebagai hak mengatur sendiri kepentingannya. Definisi tersebut memberikan pengertian bahwa otonomi sendiri berkaitan sebagai bentuk keleluasaan untuk mengatur masalah internal tanpa diintervensi oleh pihak lain dengan kata lain apabila dikaitkan dengan kata daerah maka otonomi daerah sendiri berarti pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk mengatur pemerintahannya sendiri dengan caranya sendiri.

Asas umum pemerintahan yang layak sesungguhnya adalah rambu- rambu bagi para penyelenggara Negara dalam menjalankan tugasnya. Rambu- rambu tersebut diberlakukan agar tindakan-tindakannya tetap sesuai dengan tujuan hukum yang sesungguhnya.

Sebagai rambu - rambu penyelenggara pemerintahan yang baik pada awalnya bukan merupakan

sekumpulan norma-norma hukum, tetapi sekumpulan prinsip yang bertendesi bermuatan etis. Dengan perkataan yang lain, Asas-asas pemerintahan yang baik pada awalnya merupakan etika penyelenggaraan pemerintah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Maros, dan titik pengambilan data penelitian mengenai upaya penanggulangan kemiskinan pada Kantor Dinas Sosial yang ada di Kabupaten Maros.

Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan para informan sebagai data primer dan tulisan atau dokumen yang mendukung pernyataan informan. Data primer yaitu data yang diperoleh oleh peneliti melalui wawancara mendalam depth interview dengan informan yaitu Dinas Sosial Kabupaten Maros. Sedangkan Data sekunder adalah data pelengkap yang berkenaan dengan dokumen, peraturan dan perundang-undangan atau data

lain yang sifatnya tertulis dan berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Pengecekan keabsahan data ini dilakukan dengan melalui dua cara yaitu Trigulasi dan Member Check. Menurut Sugiyono, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan dilakukan secara interaksi dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Terdapat 3 komponen yang digunakan dalam menganalisis data, yaitu Konduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Komunikasi

Dari keempat indikator yang menjadi acuan dalam mengukur implementasi kebijakan adalah indikator komunikasi ditempatkan pada posisi teratas dalam besarnya pengaruh terhadap keefektifan implementasi kebijakan. Ini berkaitan dengan interrelasi dan interaksi antara aktor perumus kebijakan (pengambil keputusan) dengan aktor pelaksana kebijakan, maupun komunikasi antara pelaksana kebijakan dengan kelompok sasaran (target group).

Agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik maka pelaksana kebijakan harus memahami secara utuh materi kebijakan yang akan dilaksanakan, baik dari substansi teknis maupun latarbelakang historis dan filosofis dari kebijakan tersebut.

Dalam pembahasan mengenai indikator komunikasi, penulis akan menguraikan secara detail sesuai variabel menurut George Edwards III yang harus dipenuhi agar komunikasi kebijakan berlangsung secara efektif, yaitu transmisi (transmission), kejelasan (clarity) dan konsistensi (consistency).

penyampaian (transmission) antara komunikator dengan komunikan harus dirancang sedemikian rupa dengan menggunakan saluran-saluran komunikasi yang baik dan sesuai dengan kondisi, serta selalu memperhatikan faktor-faktor hambatan komunikasi yang mungkin terjadi.

Dalam dimensi yang pertama adalah mengenai transmisi penyampaian (transmission), menurut penulis unsur utama yang menjadi bagian penting dari transmisi dalam komunikasi adalah terdiri dari komunikator (communicator), penerima (receiver), media (transmitter-channel), serta hambatan komunikasi (noise). Dalam hal komunikator berfungsi sebagai pengambil keputusan kebijakan (policy maker) dan implementator kebijakan yang kenyataannya berada pada beberapa lapisan birokrasi.

Komunikator harus memiliki beberapa persyaratan mendasar untuk melakukan komunikasi yaitu keterampilan mempengaruhi orang lain, memahami rumusan substansi kebijakan sebagai materi yang akan dikomunikasikan serta kepercayaan diri yang tinggi (Ibrahim, 2003), dalam hal ini adalah tugas dari Pemerintah dan bagian Humas di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Maros secara khusus.

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan oleh penulis dari wawancara informan adalah dalam hal penyampaian informasi mengenai kebijakan KIP, yang berperan sebagai

penerima adalah calon penerima KIP dan pihak sekolah berdasarkan kebijakan yang menjadi turunan langsung ke pemerintahan setempat dan Dinas Terkait.

Menurut penulis, beberapa pendapat yang dikemukakan oleh staf / pegawai Dinas Sosial Kabupaten Maros menyatakan bahwa Transmisi delegasi yang diberikan untuk bupati kepada Dinas Sosial Kabupaten Maros cukup baik untuk menjalankan kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) memang seharusnya seperti itu karena program pemerataan dan kebijakan KIP ini merupakan program unggulan dari Presiden.

2. Kejelasan (clarity)

Mengenai kejelasan dalam aturan kebijakan yang telah dibuat oleh Bupati terhadap Dinas Sosial Kabupaten Maros sudah jelas aturannya karena memang yang dibuat oleh pemerintah setempat diberbagai kabupaten yang ada di Indonesia merupakan turunan dari kebijakan presiden, yang perlu dilakukan hanyalah pelaksanaan nyata.

3. Sumber Daya

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, baik yang berada di sisi internal atau sisi eksternal organisasi pelaksana kebijakan. Faktor internal yang mempengaruhi proses implementasi seperti faktor pelaksana dan juga sumber daya serta bagaimana implementasi itu dilakukan. Semua faktor tersebut bisa menjadi unsur yang berdiri sendiri atau secara bersama sama saling berinteraksi mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Jika pada sub bab selanjutnya hanya difokuskan masing masing faktor yang memiliki peran dalam mempengaruhi implementasi kebijakan, maka bahasan selanjutnya dikemukakan interaksi antar faktor yang menjadi unsur kebijakan yang saling berinteraksi dalam mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

Setiap tahap implementasi menuntut agar adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan sesuai dengan pekerjaan yang diberikan oleh kebijakan yang ditetapkan secara politik. Manusia sebagai sumber daya yang sangat terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan, hal ini dikarenakan keberhasilan dalam implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia khususnya sumber daya manusia. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan yang penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya kebijakan (policy resources) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Dalam Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan tersebut, dapat disimpulkan bahwa apabila suatu instansi yang mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan suatu program yang dalam hal ini adalah program dari kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) mengalami kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya, maka sumber daya manusia yang tidak memadai baik dari segi jumlah maupun kemampuan akan berdampak pada tidak terlaksananya program secara efektif dikarenakan mereka tidak mampu melakukan

pengelolaan dan pengawasan dengan baik. Beberapa faktor yang mempengaruhi jalannya sumber daya manusia, ialah

a. Staf

Dengan demikian, Jika jumlah staf dalam suatu instansi pelaksana kebijakan terbatas maka upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kemampuan para pelaksana untuk menjalankan program kebijakan tersebut. Oleh sebab itu perlu adanya peningkatan manajemen sumber daya manusia yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program kebijakan.

Apabila menganalisis sesuai dengan indikator sumber daya, maka seharusnya apabila suatu staf dalam instansi di rasa cukup sesuai kebutuhan maka yang harus di tingkatan bukan lagi jumlah staf atau pegawainya tetapi meningkatkan mutu dari sumber daya manusia yang sudah dimiliki agar lebih menguasai program yang berlangsung, kurangnya kemampuan staf pelaksana program ini disebabkan karena kebijakan yang sedang berjalan merupakan salah satu program yang memang sangat di nantikan oleh masyarakat karena berhubungan dengan uang pendanaan sekolah.

Tidak bisa di pungkiri bahwa salah satu program pemerintah yang sangat diharapkan oleh masyarakat khususnya masyarakat dengan perekonomian kelas bawah adalah Keikutsertaana pada program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Berdasarkan analisis penulis, memang tidak ada salahnya menantikan program tersebut tetapi hal ini kemudian menjadi kendala bagi staf Dinas Sosial Kabupaten Maros dalam menganalisa, memeriksa dan memutuskan siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan fasilitas dari Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini. Jadi, apabila dikaitkan dengan penanggulangan kemiskinan maka kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini sangat berperan penting khususnya bagi masyarakat dengan perekonomian kelas bawah.

b. Informasi

Tidak hanya berhubungan dengan staf yang dimiliki, hal lain yakni mengenai informasi dan wewenang dalam pengimplementasian kebijakan tersebut. Seorang staf atau implemantator harus mengetahui apa yang harus dikerjakan kedepannya, hal ini sudah jelas dan pasti semua staf di Dinas Sosial pasti mengetahui karena memang ada kebijakan khusus sesuai tugas pokok instansinya, tetapi kemudian yang menjadi salah satu masalah adalah salah satu yang menjadi fokus dari penilaian indikator ini adalah staf di instansi terkait harus mengetahui apakah org yang terlibat dalam kebijakan tersebut patuh terhadap hukum, inilah yang kemudian menjadi problem karena tidak ada penilaian atau pengawas khusus mengenai poin ini.

Disisi lain, kebijakan ini sangat berperan dalam menanggulangi kemiskinan. Tapi melihat penilaian pada indikator ini tentu harus ada umpan balik dari masyarakat sebagai pihak terkait agar mematuhi segala aturan.

c. Wewenang

berdasarkan analisis penulis salah satu hal yang sangat sulit di kendalikan adalah bagaimana wewenang itu berjalan karena implementasi kewenangan ini merupakan otoritas

atau legitimasi bagi para pelaksana kebijakan yang dalam hal ini adalah pemerintah melalui Dinas Sosial Kabupaten Maros. Mengenai sifat dari kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini sudah jelas bersifat formal karena secara nyata merupakan kebijakan unggulan dari Presiden Joko Widodo (Presiden Sekarang). Tetapi kemudian, apabila kita melihat dari sudut pandang lain bahwa wewenang dan kewenangan itu sudah pasti ada yang mendudukinya, hal ini pula yang sangat sulit di kontrol karena mengenai penyelewengan itu adalah suatu bentuk integritas dari siapapun individu yang mempunyai kuasa dan wewenang. Apabila dikaitkan dengan hasil penelitian, sejauh ini pelaksanaan wewenang masih terlaksana sesuai arah kebijakan.

d. fasilitas

fasilitas juga menjadi salah satu batu uji dalam menilai implementasi kebijakan. Ketika dikaitkan dengan batu uji yang lain seperti staf, informasi dan wewenang maka kemungkinan besar suatu instansi pasti mempunyai staf yang mengetahui berbagai macam informasi terkait kebijakan yang menjadi prioritas dan mempunyai wewenang akan suatu kebijakan, tetapi tanpa dukungan fasilitas atau sarana dan prasarana yang memadai, tetap akan menghambat suatu implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan bahwa mengenai fasilitas saran dan prasarana di Dinas Sosial Kabupaten Maros khususnya dalam program kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini masih sangat kurang, dibuktikan dari beberapa pernyataan oleh narasumber yang mengatakan bahwa tidak adanya fasilitas pendukung dalam melaksanakan tugas seperti pemanfaatan teknologi untuk mempermudah pengelolaan dan arsip data, belum tersedianya NTP untuk melakukan pengecekan data, belum adanya sistem yang bisa menghubungkan data peserta melalui BPKS dan masih kurangnya sediaan sarana penunjang untuk melakukan kunjungan sekolah.

4. Disposisi

Pemahaman dan maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting karena bagaimanapun juga implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (frustrated) ketika pelaksanaannya tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan mengenai indikator disposisi ini, sangat perlu adanya kesamaan sikap atau perspektif antara para pengambil kebijakan (decision makers) atau formulator kebijakan, dengan para implementator kebijakan. Dikatakan bahwa para implementator secara umum mempunyai kemungkinan menyimpang dalam sikap dan perspektifnya tentang kebijakan, dan ini dapat menjadi penghambat utama bagi keefektifan implementasi kebijakan, khususnya dalam kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Menurut analisis penulis, Disposisi dalam implementasi kebijakan ini diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana (implementors) tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan

tersebut.

Apabila dikaitkan dengan implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini dalam menanggulangi kemiskinan maka hal tersebut telah disambut dengan hangat oleh Instansi yakni Dinas Sosial Kabupaten Maros. Hal ini ditunjukkan dari tindak lanjut yang dilakukan pada saat kebijakan mengenai KIP ini telah digaungkan oleh pemerintah. Selain itu menurut penulis, sama halnya dengan masyarakat yang sangat menginginkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini, pemerintah juga telah membuka ruang dan pelayanan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat tetapi demikian mengenai itu hal tersebut harus mendapat dukungan dari indikator-indikator yang lain.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan bahwa Mengenai sifat demokratis yang dimiliki oleh implementor sebagai bentuk pengawasan dari pemerintah mengenai Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Dinas Sosial Kabupaten Maros yaitu dengan pengawasan by sistem yakni melalui DTKS dalam artian peserta penerima KIP ini di periksa dan di Putuskan oleh Dinas Sosial, tetapi secara spesifik pengawasan di setiap sekolah yang menerima KIP ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan karena sudah tentu jelas bahwa yang mengetahui keseluruhan datanya mengenai anak sekolah adalah dari pihak Dinas Sosial melalui data Dapodik peserta didik. Jadi, memang ada Disposisi yang terarah oleh pemerintah mengenai kebijakan KIP ini yang kemudian antara Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan melakukan kerjasama.

Walaupun Dinas Pendidikan juga mempunyai Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini tapi secara keseluruhan sistem dan pihak yang memutuskan siapa yang berhak menerima adalah Pihak Dinas Sosial, terkhusus karena KIP ini merupakan kebijakan yang salah satu fasilitasnya adalah mendapat santunan biaya sekolah bagi masyarakat menengah ke bawah maka sudah jelas yang mempunyai tugas dan fungsi pokok adalah Dinas Sosial.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis juga berpendapat bahwa yang menjadi fokus dari disposisi adalah bagaimana seseorang sebagai pelaksana dalam menunjukkan sikap mengenai apa yang dikerjakan, seperti bentuk komitmen dan kejujurannya itu telah dibuktikan bahwa di Dinas Sosial Kabupaten Maros telah melakukan disposisi dengan maksimal karena sampai saat ini sebagai staf dan pemilik wewenang masih berintegritas dalam menjalankan tugasnya dengan melakukan pekerjaan secara jujur dan dibuktikan bahwa sampai sekarang tidak pernah terjadi masalah tentang pelaksanaan program KIP di lingkup Kabupaten Maros walaupun peluang kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenanag bisa terjadi, hanya saja masalah yang timbul adalah masih kurangnya penerapan implementasi kebijakan yang harus terpenuhi karena berbagai faktor.

5. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memiliki peranan penting didalam mengefektifan implementasi kebijakan. Hal tersebut karena kegiatan tersebut melibatkan banyak orang, sehingga diperlukan upaya koordinasi dari berbagai tujuan para aktor yang mungkin berbeda-beda, merubah perilaku untuk disesuaikan dengan model implementasi yang diperlukan, serta agar

sumber-sumber yang digunakan bersifat efektif dan efisien.

Menurut penulis, salah satu faktor yang oleh sejumlah ahli dianggap sebagai faktor yang memiliki pengaruh terhadap proses implementasi kebijakan adalah struktur birokrat dan standar operasional prosedur (SOP).

a. Struktur Birokrasi

berdasarkan hal tersebut maka cara melihat faktor ini harus mendalam dan tidak cukup hanya aspek atau sisi permukaan atau pnggirannya saja. Misalnya setelah struktur organisasi dilakukan sejumlah perubahan dan pembenahan, dari yang sebelumnya dianggap buruk menjadi baik sehingga diasumsikan semakin efektif dan efisien, maka keberhasilan melakukan sejumlah perubahan itu harus dicermati dalam konteks yang lebih substantif terkait hasil dan manfaatnya. Perubahan struktural itu mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas, jangkauan menjadi luas dan sebagainya, ataupun hanya perubahan yang sifatnya struktural dan kulit luarnya saja, sementara sikap dan perilaku organisasi masih tidak banyak berubah.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh adalah bahwa struktur birokrasi mencakup aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antar unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, hubungan organisasi dengan organisasi luar dan lain sebagainya. Karenanya, struktur birokrasi (bureaucratic structure) mencakup dimensi fragmentasi (fragmentation) dan standar prosedur operasi (Standard Operating Procedure).

Dalam hal struktur birokrat, dimensi fragmentasi (fragmentation) menegaskan bahwa struktur birokrasi yang terfragmentasi dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, di mana para pelaksana kebijakan akan punya kesempatan yang besar berita atau instruksinya akan terganggu. Fragmentasi birokrasi ini akan membatasi kemampuan para penjabat puncak untuk mengkoordinasikan semua sumber daya yang relevan dalam suatu yuridiksi tertentu, akibat lebih lanjut adalah terjadinya ketidak efisienan dan pemborosan sumberdaya langka. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan yang kompleks, perlu adanya kerja sama yang baik dari banyak orang. Oleh karenanya dengan adanya fragmentasi organisasi (organisasi yang terpecah-pecah), dapat merintangangi koordinasi yang diperlukan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan yang kompleks, dan dapat memboroskan sumber-sumber langka, adanya perubahan yang tidak diinginkan (perubahan-perubahan tidak seperti biasanya), menciptakan kegaduhan, kebingungan, yang kesemuanya itu akan mengarah pada pelaksanaan kebijakan yang menyimpang dari tujuan semula yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan oleh penulis, dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Maros, program Kartu Indonesia Pintar (KIP) sangat berpengaruh bagi masyarakat. Melalui wawancara dengan beberapa staf bahwa Struktur birokrasi yang ada saat ini memang sudah ada dan jelas dan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing tiap unit itu sudah ada Standar Operasional Prosedurnya (SOP) sesuai kewenangan

masing-masing. Tetapi, yang kemudian menjadi salah satu masalah adalah ketika suatu instansi yang dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Maros sudah mempunyai SOP yang jelas dan Struktur organisasi yang jelas pula tetapi belum maksimal dalam melakukan suatu kegiatan dan program kerjanya yang dalam hal ini adalah kebijakan mengenai Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian implementasi kebijakan tentang pemungutan retribusi pasar Nursalim (2017) , sudah sesuai dengan teori george edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi telah terlaksanakan 4 variabel pada program kartu indonesia pintar.

Penelitian sartika (2018) dengan judul Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Di Desa Rompegading Kecamatan Cenrana kabupaten maros merupakan hasil penelitian yang serupa yang bertujuan untuk mengetahui implementasi kartu indonesia pintar yang ada dikabupaten maros.

Penelitian wina aapriliani (2021) tentang implementasi program kartu indonesia pintar (KIP) Di Desa Sidosari Kecamatan Natar sudah sesuai dengan teori edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dengan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dinas sosial Kabupaten Maros telah menerapkan dan mengimplementasikan kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Maros. Untuk mengukur implementasi tersebut menggunakan empat indikator yaitu (1)

Komunikasi mengenai implementasi kebijakan KIP telah dibuat oleh pemerintah sebagai program unggulan Presiden dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Maros melalui transmisi delegasi yang diberikan melalui Bupati Maros ke Dinas Sosial; (2) Sumber daya yang dalam hal ini adalah staf / pegawai yang menangani peserta KIP masih kurang karena belum ada staf yang disiapkan dari tataran terendah di setiap desa dan sarana atau fasilitas pendukung yang masih minim dalam menunjang pekerjaan dan pengelolaan KIP; (3) Disposisi telah dijalankan dengan baik oleh pemerintah dan pemangku jabatan yang dibuktikan dengan berbagai macam dukungan dan pengawasan. Bentuk dukungan yang diberikan dengan bersinergi dengan dinas-dinas lain yang terkait dan pengawasan yang dilakukan melalui DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial); dan (4) Struktur Birokrasi dan pemangku jabatan beserta struktur yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Maros telah dibuat berdasarkan tugas dan fungsi pokok masing-masing yang telah dilengkapi dengan struktur organisasi yang dibarengi dengan unit-unit pendukung.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa saran agar pekasanaan program penanggulangan kemiskinan pada umumnya dan pelaksanaan khususnya melalui kartu indonesia pintar (KIP) dikabupaten maros, tepat sasaran dan mampu membantu masyarakat

yang kurang mampu dalam menunjang pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan antara lain Diharapkan kepada pemerintah dalam membangun komunikasi yang lebih intensif dan membuka peluang bagi masyarakat yang kurang mampu dalam melanjutkan pendidikan, Pemerintah harus berupaya meningkatkan pemerataan pendidikan serta memberikan kemudahan bagi masyarakat yang kurang mampu yang ingin mendapatkan bantuan pemerintah melalui kartu indonesia pintar (KIP) dikabupaten maros.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, F & Alam, A. S 2016. *Studi Kebijakan Pemerintah* (R. R Aditama). Refika Aditama
- Almusyhaful 2018, Implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis program kelompok usaha bersama KUBE Di Sulbar
- Apriliana wina, 2021, Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Di Desa Sidosari Kecamatan Natar.
- Lisnawati, 2020, Implementasi Program Rumah Bakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kots Makassar.
- Mulyadi, 2018, *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*, Alfabeta.
- Nur, A. C 2018. *Peranan Dan Tatanan Kebijakan Publik*. AGMA.
- Nursalim, 2017, Implementasi Kebijakan Tentang Pemungutan Retribusi Pasar oleh Unit Pelaksana Teknis Pasar Perdagangan Kabupaten Tasik Malaya.
- Sartika,2018, Implementasi Kebijakan Pemerintah Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP).
- Undang-undang Nomor .24 Tahun (2004), Tentang Kemiskinan.
- Peraturan presiden Nomor. 166 tahun 2014, Tentang Kemiskinan.
- Suharno, 2016, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. UNY Press.
- Santoso, P. 2017. *Administrasi Publik Teori Dan Aplikasi Good Governance*. Refika Aditama.
- Sugiyono,2015, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Usman, 2012. *Konsep Implementasi*. Grasindo.